

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 /PMK.07/2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012

RINCIAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2012 PER PROVINSI

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	BOS ¹⁾			DANA CADANGAN BOS ²⁾			TOTAL		
		SD	SMP	JUMLAH	SD	SMP	JUMLAH	SD	SMP	JUMLAH
1	Aceh	295.840.600.000	143.235.400.000	439.076.000.000	15.208.760.000	7.363.410.000	22.572.170.000	311.049.360.000	150.598.810.000	461.648.170.000
2	Sumatera Utara	1.055.329.720.000	444.829.910.000	1.500.159.630.000	54.254.940.000	22.866.260.000	77.121.200.000	1.109.584.660.000	467.696.170.000	1.577.280.830.000
3	Sumatera Barat	393.532.320.000	147.362.650.000	540.894.950.000	20.230.980.000	7.574.280.000	27.805.260.000	413.763.300.000	154.936.910.000	568.700.210.000
4	Riau	451.836.240.000	159.275.010.000	611.111.250.000	23.229.000.000	8.188.430.000	31.417.430.000	475.065.240.000	167.463.440.000	642.528.680.000
5	Kepulauan Riau	110.894.260.000	42.508.410.000	153.402.670.000	5.700.820.000	2.186.090.000	7.886.910.000	116.595.080.000	44.694.500.000	161.289.580.000
6	Jambi	238.931.580.000	85.421.520.000	324.353.100.000	12.283.240.000	4.391.350.000	16.674.590.000	251.214.820.000	89.812.870.000	341.027.690.000
7	Sumatera Selatan	544.909.420.000	229.354.140.000	774.263.560.000	28.014.000.000	11.790.260.000	39.804.260.000	572.923.420.000	241.144.400.000	814.067.820.000
8	Kep. Bangka Belitung	89.853.600.000	32.964.590.000	122.818.190.000	4.619.120.000	1.694.770.000	6.313.890.000	94.472.720.000	34.659.360.000	129.132.080.000
9	Bengkulu	132.564.220.000	60.798.720.000	193.362.940.000	6.815.000.000	3.125.420.000	9.940.420.000	139.379.220.000	63.924.140.000	203.303.360.000
10	Lampung	524.413.380.000	222.076.640.000	746.490.020.000	26.959.560.000	11.416.800.000	38.376.360.000	551.372.940.000	233.493.440.000	784.866.380.000
11	DKI Jakarta	482.788.520.000	243.951.740.000	726.740.260.000	24.820.520.000	12.550.850.000	37.371.370.000	507.609.040.000	256.502.590.000	764.111.630.000
12	Jawa Barat	2.804.806.340.000	1.175.516.470.000	3.980.322.810.000	144.192.060.000	60.432.360.000	204.624.420.000	2.948.998.400.000	1.235.948.830.000	4.184.947.230.000
13	Banten	719.240.020.000	276.110.480.000	995.350.500.000	36.975.580.000	14.193.610.000	51.169.190.000	756.215.600.000	290.304.090.000	1.046.519.690.000
14	Jawa Tengah	1.841.402.560.000	854.434.590.000	2.695.837.150.000	94.665.860.000	43.927.700.000	138.593.560.000	1.936.068.420.000	898.362.290.000	2.834.430.710.000
15	DI Yogyakarta	175.176.820.000	88.548.360.000	263.725.180.000	9.005.660.000	4.551.100.000	13.556.760.000	184.182.480.000	93.099.460.000	277.281.940.000
16	Jawa Timur	1.827.809.100.000	862.249.560.000	2.690.058.660.000	93.966.380.000	44.326.720.000	138.293.100.000	1.921.775.480.000	906.576.280.000	2.828.351.760.000
17	Kalimantan Barat	372.228.920.000	138.649.510.000	510.878.430.000	19.136.520.000	7.126.980.000	26.263.500.000	391.365.440.000	145.776.490.000	537.141.930.000
18	Kalimantan Tengah	171.235.140.000	61.859.460.000	233.094.600.000	8.803.820.000	3.179.380.000	11.983.200.000	180.038.960.000	65.038.840.000	245.077.800.000
19	Kalimantan Selatan	233.573.540.000	75.054.100.000	308.627.640.000	12.007.160.000	3.856.720.000	15.863.880.000	245.580.700.000	78.910.820.000	324.491.520.000
20	Kalimantan Timur	271.315.880.000	111.610.580.000	382.926.460.000	13.948.420.000	5.738.220.000	19.686.640.000	285.264.300.000	117.348.800.000	402.613.100.000
21	Sulawesi Utara	163.854.060.000	78.826.330.000	242.680.390.000	8.423.920.000	4.050.550.000	12.474.470.000	172.277.980.000	82.876.880.000	255.154.860.000
22	Gorontalo	83.924.840.000	31.759.010.000	115.683.850.000	4.314.040.000	1.633.000.000	5.947.040.000	88.238.880.000	33.392.010.000	121.630.890.000
23	Sulawesi Tengah	224.544.680.000	82.696.540.000	307.241.220.000	11.543.740.000	4.252.190.000	15.795.930.000	236.088.420.000	86.948.730.000	323.037.150.000
24	Sulawesi Selatan	611.144.260.000	269.638.120.000	880.782.380.000	31.419.180.000	13.861.330.000	45.280.510.000	642.563.440.000	283.499.450.000	926.062.890.000
25	Sulawesi Barat	104.882.560.000	41.187.810.000	146.070.370.000	5.391.680.000	2.117.930.000	7.509.610.000	110.274.240.000	13.305.740.000	153.579.980.000

PK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	PROVINSI	BOS ¹⁾			DANA CADANGAN BOS ²⁾			TOTAL		
		SD	SMP	JUMLAH	SD	SMP	JUMLAH	SD	SMP	JUMLAH
26	Sulawesi Tenggara	203.389.180.000	84.671.050.000	288.060.230.000	10.456.820.000	4.352.300.000	14.809.120.000	213.846.000.000	89.023.350.000	302.869.350.000
27	Bali	243.638.860.000	125.998.020.000	369.636.880.000	12.525.100.000	6.477.330.000	19.002.430.000	256.163.960.000	132.475.350.000	388.639.310.000
28	Nusa Tenggara Barat	314.608.240.000	124.702.270.000	439.310.510.000	16.173.300.000	6.410.590.000	22.583.890.000	330.781.540.000	131.112.860.000	461.894.400.000
29	Nusa Tenggara Timur	492.549.340.000	187.052.340.000	679.601.680.000	25.320.480.000	9.616.240.000	34.936.720.000	517.869.820.000	196.668.580.000	714.538.400.000
30	Maluku	143.161.980.000	64.445.990.000	207.607.970.000	7.359.620.000	3.314.280.000	10.673.900.000	150.521.600.000	67.760.270.000	218.281.870.000
31	Maluku Utara	102.871.120.000	42.470.780.000	145.341.900.000	5.287.860.000	2.183.250.000	7.471.110.000	108.158.980.000	44.654.030.000	152.813.010.000
32	Papua	241.180.820.000	74.425.040.000	315.605.860.000	12.400.400.000	3.826.190.000	16.226.590.000	253.581.220.000	78.251.230.000	331.832.450.000
33	Papua Barat	81.694.740.000	28.303.440.000	109.998.180.000	4.200.360.000	1.454.790.000	5.655.150.000	85.895.100.000	29.758.230.000	115.653.330.000
	Total	15.749.126.860.000	6.691.988.560.000	22.441.115.420.000	809.653.900.000	344.030.680.000	1.153.684.580.000	16.558.780.760.000	7.036.019.240.000	23.594.800.000.000

Catatan:

¹⁾ BOS yang disalurkan per triwulan sebesar 1/4 (satu per empat) dari Jumlah alokasi BOS

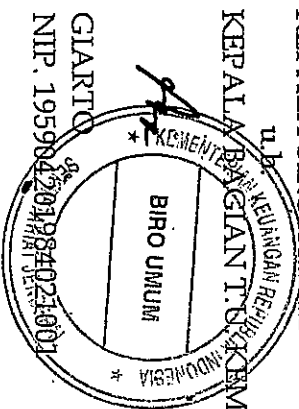
²⁾ Dana Cadangan BOS akan disalurkan setelah ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN TUGAS KEMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN,
ttd,
AGUS D.W. MARTOWARDOJO





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN

KOP
KEPALA
DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2012

PROVINSI ... (1)
TRIWULAN ... (2)

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Triwulan I	: Rp	(3)
- Triwulan II	: Rp	(4)
- Triwulan III	: Rp	(5)
- Triwulan IV	: Rp	(6)
- Jumlah	: Rp	(7)

Realisasi Penyaluran ke Sekolah melalui SP2D Provinsi

- Kumulatif s.d Triwulan sebelumnya	: Rp	(8)
- Triwulan ini	: Rp	(9)
- Kumulatif s.d Triwulan ini	: Rp	(10)

Sisa BOS di Rekening Kas Umum Daerah : Rp (11)

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat (12), Tanggal (13)
Gubernur (14)

(tanda tangan asli dan stempel basah) (15)

Nama (16)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYALURAN

NO.	URAIAN
1	Diisi nama provinsi.
2	Diisi triwulan berkenaan dan Laporan dibuat per triwulan (tidak digabung).
3	Diisi transfer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan I.
4	Diisi transfer BOS dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan II.
5	Diisi transfer BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah triwulan III.
6	Diisi transfer BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada triwulan IV
7	Diisi jumlah transfer BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (nomor 3+4+5+6)
8	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS yang disalurkan apabila terdapat kurang salur) ke sekolah pada triwulan sebelumnya.
9	Diisi jumlah penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS yang disalurkan apabila terdapat kurang salur) ke sekolah pada triwulan berkenaan (harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun Anggaran 2012 pada triwulan berkenaan).
10	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS yang disalurkan apabila terdapat kurang salur) ke sekolah pada triwulan sebelumnya dengan triwulan berkenaan. (nomor 8+9).
11	Diisi seluruh sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah. (nomor 10-7)
12	Diisi tempat dibuatnya laporan.
13	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
14	Diisi nama provinsi.
15	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
16	Diisi nama lengkap penandatangan laporan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BANGSIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 195904281984021001

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 /PMK.07/2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2012

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP
KEPALA
DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
REALISASI PENYALURAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur menyatakan telah merealisasikan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah pada Triwulan dalam Tahun Anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

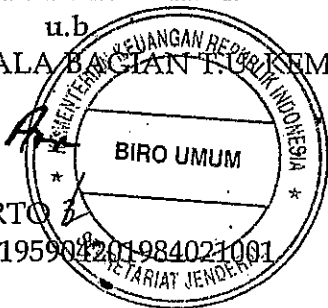
Tempat, tanggal.....
Gubernur

Nama

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b
KEPALA BANGSIAN T. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,
ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

